

## KEUANGAN



PAMERAN: UMKM binaan Bank Jatim berpartisipasi di misi dagang Pemprov Jatim di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## Bank Jatim Dukung Misi Dagang Jawa Timur dan NTB

DALAM rangka memperkuat koneksi perdagangan dalam negeri, Bank Jatim turut mendukung gelaran Misi Dagang dan Investasi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Mataram, NTB, Rabu (10/7).

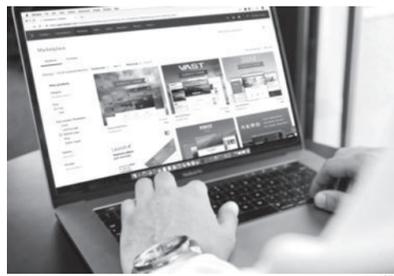
Hal ini diwujudkan dengan mengikutsertakan beberapa UMKM Binaan Bank Jatim dalam acara bertajuk Misi Dagang & Investasi Meningkatkan Jejaring Konektivitas antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bertempat di Hotel Lombok Raya, kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal, dan Plt. Direktur Utama Bank Jatim Arif Suhirman.

Arif menjelaskan misi dagang merupakan wadah untuk mempertemukan pelaku UMKM antar daerah atau provinsi dengan pembeli. Selain pertemuan pelaku usaha, gelaran ini juga menjadi gerbang pertukaran sosial budaya antar daerah.

Lewat kegiatan tersebut juga sebagai salah satu upaya Bank Jatim untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan memperluas inklusi keuangan. "Kami saat ini memang terus berupaya untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM," paparnya. (mus/opi)

## PERDAGANGAN



ILUSTRASI: Pemerintah mewajibkan platform e-commerce untuk memungut PPh dari pelaku usaha dalam negeri yang berjualan secara daring.

## Market Place Wajib Pungut PPh 22

PEMERINTAH mewajibkan platform e-commerce untuk memungut pajak penghasilan (PPh) dari pelaku usaha dalam negeri yang berjualan secara daring. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang diteken Sri Mulyani pada 11 Juni 2025.

Lewat beleid tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak, memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan kesederhanaan administrasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak, maka perlu disusun pengaturan terhadap penunjukan pihak lain yang merupakan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut PPh.

"Serta tata cara pemungutan, penyerahan, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik," bunyi pertimbangan beleid tersebut, Senin (14/7).

PMK ini menunjuk PPMSE yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam wilayah negara Indonesia dan luar wilayah Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu. (one/opi)

# Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 7.075 Triliun

SURABAYA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei tercatat sebesar USD 435,6 miliar atau sekitar Rp 7.075 triliun (kurs 16.243 per USD). Secara tahunan, utang Indonesia tersebut tumbuh 6,8 persen (yoy). Lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada April sebesar 8,2 persen (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramadan Denny Prakoso menjelaskan, perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN di sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN swasta. ULN pemerintah tumbuh lebih rendah.

"Posisi ULN pemerintah pada Mei 2025 sebesar USD 209,6 miliar atau tumbuh sebesar 9,8 persen (yoy). Lebih

rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,4 persen (yoy) pada April 2025," jelas Ramadan dalam keterangan resminya, Senin (14/7).

Lebih jauh ia menjelaskan, perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh pembayaran jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) internasional, di tengah aliran masuk modal asing pada SBN domestik. "Seiring tetap terjaganya kepercayaan investor global terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global," sambungnya.

Ramadan menyebut, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan pada program-priori-



RAMDAN DENNY PRAKOSO  
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI

Posisi ULN pemerintah pada Mei 2025 sebesar USD 209,6 miliar atau tumbuh sebesar 9,8 persen (yoy)."

Langkah ini dalam mendukung stabilitas dan momentum pertumbuhan eko-

nomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7 persen), Jasa Pendidikan (16,5 persen), Konstruksi (12,0 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,7 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah. "Untuk Utang Luar Negeri (ULN) swasta melanjutkan kontraksi per-

tumbuhan," ungkapnya.

Pada Mei, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD 196,4 miliar. Angka itu mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9 persen (yoy). "Lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4 persen (yoy)," tegasnya.

Ramdan mengatakan, perkembangan tersebut bersumber dari ULN lembaga keuangan yang mencatat perlambatan pertumbuhan dari bulan sebelumnya sebesar 2,8 persen menjadi 1,2 persen pada Mei. "Dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 1,4 persen (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi 1,2 persen (yoy) pada April 2025," jelasnya. (uta/opi)

## Harga Batu Bara Anjlok, Setoran Tambang Baru Rp 68,3 Triliun

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) hingga 30 Juni sebesar Rp 68,3 triliun. Jumlah ini baru mencapai 54 persen dari target yang ditetapkan pada tahun ini sebesar Rp 126,48 triliun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa capaian tersebut dilatibela oleh penurunan harga batu bara yang saat ini tengah terjadi akibat kondisi pasar global yang fluktuatif. "Sampai bulan Juni ini memang pasar global lagi tidak menentu karena itu sebagai info 30 Juni 2025 realisasi PNBP Minerba Rp 68,3 triliun 54 persen dari target Rp 126,48 triliun," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (14/7).

Meski demikian, Bahlil tetap optimistis bahwa target PNBP sektor minerba akan

tercapai pada tahun ini. "Jadi target kita batu bara itu mineral batu bara itu dari Rp 126 triliun udah realisasi Rp 68,3 triliun, jadi insyaallah mudah-mudahan target sampai selesai," katanya.

Sementara itu, secara keseluruhan realisasi PNBP sektor ESDM hingga akhir Juni 2025 telah mencapai Rp 117,11 triliun. Angka itu sekitar 46 persen dari target Rp 254 triliun untuk tahun anggaran 2025. "Jadi insyaallah target APBN bisa dicapai keseluruhan dari 2025. Sekalipun berat karena harga komoditas pasang surut," ujar Bahlil.

Ia mengakui bahwa mengejar target APBN saat ini memang tidak mudah, mengingat kondisi harga komoditas yang tengah mengalami fluktuasi. "Sekalipun memang kerjanya berat, semua ini memang kerjanya berat, karena harga komoditas lagi pasang surut," ucap Bahlil.

Ia pun menyampaikan la-



SUMBER DAYA ALAM: Kementerian ESDM mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) hingga 30 Juni sebesar Rp 68,3 triliun.

poran tahun lalu, dengan catatan Kementerian ESDM yang telah berkontribusi dalam memberikan penerimaan negara sebesar Rp 119,55 triliun, turun dari target PNBP dari sektor minerba dan realisasinya sekitar 150 atau 100 persen lebih. "Kemudian total pencapaian PNBP di sektor ESDM di 2024 sebe-

saar Rp 269,65 triliun, lebih tinggi dari target yaitu sebesar Rp 238,39 triliun," tambah Bahlil.

Ia merinci, realisasi PNBP sektor migas mencapai Rp 110,92 triliun dari target Rp 110,15 triliun. Sementara itu, realisasi dari sektor minerba tercatat sebesar Rp 140,46 triliun, melampaui target Rp

113,54 triliun. Untuk panas bumi, target sebesar Rp 2,18 triliun juga terlampaui dengan realisasi Rp 2,84 triliun. Adapun dari kategori lainnya, realisasi mencapai Rp 15,44 triliun dari target Rp 12,51 triliun. "Artinya secara kumulatif PNBP kita mencapai 113 persen dari target 2024," tutup Bahlil. (ara/opi)

## Investasi Rp 6 Triliun, Indonesia Siap Jadi Pusat Quantum AI

JAKARTA - Indonesia bersiap menjadi pusat komputasi mutakhir berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dan teknologi kuantum pertama di Asia melalui pembangunan *Quantum AI Data Center*. Proyek strategis ini akan menempatkan Indonesia sebagai pemimpin di bidang digital masa depan.

Investasi proyek tahap awal ini senilai USD 400 juta atau sekitar Rp 6 triliun. Difasilitasi langsung oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Langkah besar ini diumumkan dalam penandatanganan kerja sama antara perusahaan teknologi asal Silicon Valley, Worldvuer iByond Limited, dan Tunas Prima Industrial Estate pada 9 Juli lalu di Jakarta.

"Hal ini sejalan dengan direktif Presiden Prabowo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen menuju Indonesia Emas 2045. Ekonomi digital, khususnya pusat data, adalah pilar utama untuk mencapainya. Indonesia memiliki potensi luar biasa di sektor ini, dan kami siap menjadi mitra utama dalam membangun masa depan digital Asia," ujar Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, dalam keterangannya di lansir Senin (14/7).



KERJA SAMA: Penandatanganan kerja sama antara Tunas Prima Industrial Estate dengan Worldvuer iByond Limited disaksikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, serta dihadiri oleh Her Highness Princess Anne Shek, Chairman of Advisory Board for Asia, Worldvuer iByond Limited.

*Quantum AI Data Center* ini akan dibangun di Tunas Prima Industrial Estate, kawasan industri hijau di Batam, Kepulauan Riau, yang telah mengadopsi teknologi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengolahan air mandiri. Kawasan ini sebelumnya telah menarik minat investasi dari raksasa global seperti Apple, termasuk untuk produksi iPhone dan AirTags.

Worldvuer iByond Limited sendiri merupakan pengembangan sistem operasi Vovea iByond, yang menginte-

grasikan berbagai teknologi canggih seperti komputasi kuantum, AI, dan analitik big data, sehingga mampu memberikan kecepatan serta kapasitas pemrosesan jauh di atas pusat data konvensional.

Setelah sukses diterapkan di Silicon Valley dan Timur Tengah, Indonesia akan menjadi basis pertama teknologi ini di Asia. Tak hanya membangun pusat data, Worldvuer iByond juga membuka peluang kerja sama di sektor lain.

Mereka menjajaki kolaborasi di bi-

dang energi, meniru pola kemitraan dengan Aramco di Arab Saudi, serta menjajahi potensi sinergi di sektor telekomunikasi dengan Telkom Group dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem OSS, kami telah menyederhanakan regulasi.

Kami juga menyediakan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday, super tax deduction untuk riset dan pengembangan SDM, serta pembebasan bea masuk untuk peralatan. Ini bentuk komitmen kami untuk mendukung investasi berkualitas seperti proyek ini," tambah Todotua.

Sebagai langkah berikutnya, Worldvuer iByond Limited akan segera mengajukan proposal resmi insentif beserta dokumen pendukung kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Selain itu, mereka juga siap membuka kerja sama lintas sektor, termasuk pendidikan dan pertambangan. Khususnya dalam pengembangan rantai pasok microchip berbasis emas.

"Dengan terwujudnya proyek ini, Indonesia tak hanya memperkuat posisinya dalam peta ekonomi digital global, tetapi juga membuka jalan menuju masa depan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya. (nis/opi)